

Perkembangan Paradigma Pendampingan Pastoral di Indonesia¹

Phan Bien Ton²

Abstrak

Tulisan ini bermaksud menyoroti bagaimana perkembangan paradigma pendampingan pastoral di Indonesia dan kemudian menarik implikasinya secara khusus bagi peranan pemimpin jemaat dalam pendampingan pastoral. Perkembangan paradigma pendampingan pastoral sangat dipengaruhi oleh konteks sosio historis Indonesia, setelah mengalami perkembangan tersebut disimpulkan bahwa pendampingan pastoral adalah upaya integratif komunitas Kristen yang bergumul bersama-sama dengan komunitas umat lain di tengah-tengah keprihatinan masa kini yang muncul dalam situasi sosial politik, budaya dan lingkungan hidup mereka dengan tujuan untuk mengurangi akibat dosa dan penderitaan, dan mentransformasi hidup sesuai dengan harkat kemanusiaan. Konsep pendampingan pastoral yang makin meluas tersebut membutuhkan pemimpin jemaat yang juga mampu menghayati perannya yang meluas, meliputi tiga aspek pelayanan baik di dalam maupun di luar dinding-dinding Gereja: aspek individual, komunitas, dan masyarakat luas. Dalam pelayanan pendampingan pastoral yang menyeluruh itu, citra sebagai pemampu merupakan citra yang diharapkan menjadi dasar identitas pemimpin jemaat.

Kata kunci: Pendampingan Pastoral; Konteks Sosio Historis; Citra Pemampu.

1. PENDAHULUAN

“Pendampingan Pastoral” akhir-akhir ini makin menjadi istilah yang dikenal dengan baik dalam kehidupan berjemaat. Istilah ini diambil dari citra mengenai relasi seorang gembala dengan domba-

dombanya, untuk menyatakan tugas pendampingan yang harus dilaksanakan oleh para pemimpin Kristen terhadap anggota Gereja dan masyarakatnya. Istilah ini dipakai untuk menterjemahkan istilah “*Pastoral Care*” dalam bahasa

Inggris dan dirasakan lebih bernuansa keutuhan dan kesejahteraan menyeluruh, serta lebih dinamis, *ketimbang* istilah-istilah lain seperti “Perawatan Rohani (*Spiritual Care*)” atau “Pemeliharaan Jiwa (*Soul Care*)”. Istilah “Pendampingan Pastoral” juga makin disukai untuk menggantikan istilah “penggembalaan” yang sudah lebih dahulu dikenal, karena lebih menggambarkan kesetaraan antara yang melayani dan yang dilayani, dan lebih menggambarkan tanggungjawab seluruh umat beriman dan bukan hanya pandeta selaku gembala terhadap dombanya.

Tulisan ini bermaksud menyoroti bagaimana perkembangan paradigma pendampingan pastoral di Indonesia dan kemudian menarik implikasinya secara khusus bagi peranan Majelis Jemaat dalam pendampingan pastoral.

Untuk dapat menggambarkan perkembangan paradigma pendampingan pastoral di Indonesia kita perlu melihat konteks sosio historis yang muncul, karena pendampingan pastoral tidak pernah dilaksanakan dalam sebuah kevakuman, ia selalu dikerjakan dalam konteks sosio historis tertentu (Browning, 1976: 18).

Dalam pendekatan seperti ini, saya membagi perkembangan paradigma pendampingan pastoral di Indonesia ke dalam 5 tahap: sebelum tahun 1960-an, dasawarsa 60-an, dasawarsa 70-an sampai sekitar pertengahan dasawarsa 80-an, sekitar pertengahan dasawarsa 80-an sampai 1998, dan tahun 1998-saat kini.³

2. SEBELUM 1960

Kekristenan Indonesia dan termasuk pelayanan pastoralnya, sebelum Kemerdekaan Nasional mempunyai bentuk dan isi yang boleh dikatakan “*foto copy*” dari kekristenan dan pelayanan pastoral di Belanda. Tidak heran kalau agama Kristen dicap sebagai “Agama Belanda” (Cooley, 1981: 309).

Gereja pada jaman kolonial tersebut ada dalam kondisi steril, tanpa daya dan tidak mampu merespon tantangan-tantangan yang muncul pada jamannya. Ia boleh dikatakan tidak mempunyai kaitan dengan kehidupan sosial politik di luar Gereja sama sekali (Sumartana, 1982: 17). Kecenderungan a-politik dan a-historik inilah yang selalu dicoba untuk dikoreksi oleh para pemimpin Kristen pada waktu itu, antara lain: J. Leimena, T. S. G. Mulia, dan A. M. Tambunan dari Protestan;

maupun Kasimo dan Soegiyopranoto dari Katholik.

Setelah Kemerdekaan Nasional dan selama dasawarsa 50-an, di tengah tugas *urgen* untuk "*nation-building*", Gereja dan bangsa Indonesia sibuk menghadapi masalah-masalah besar, baik perang-perang revolusi, pemberontakan-pemberontakan regional terhadap pemerintahan pusat, dan khususnya gerakan DITII yang menginginkan bentuk pemerintahan Islam. Para pemimpin Gereja pada waktu itu memang belum cukup dilengkapi untuk berrefleksi secara teologis terhadap semua masalah historik, sosial dan politik tersebut. Karenanya dapat dimaklumi apabila Gerejapun hanya memberikan pelayanan pastoral yang tradisionil, dari pendeta dipusatkan untuk para anggota Gereja agar dapat bertahan di tengah-tengah situasi sulit tersebut.

3. DASAWARSA 60-AN

Pada tahun 1960-an Gereja dicengkeram oleh ide-ide "*revolusi*" "*perubahan sosial secara cepat*", di bawah pengaruh "*Demokrasi Terpimpin*" dan "*Revolusi Tanpa Akhir*" yang didengungkan oleh Presiden

Soekarno, yang menghendaki semua lapisan masyarakat, termasuk Gereja di dalamnya, untuk berpartisipasi. Orang Kristen-pun bergumul mengenai sikap mereka terhadap kepemimpinan Soekarno di tengah problem sosial-politik bangsa (Simatupang, 1982: 26).

Berdirinya pemerintahan "*Orde Baru*" di bawah Jendral Soeharto setelah pertumpahan darah dan ratusan ribu korban jiwa, merubah situasi politik secara menyeluruh. Perubahan-perubahan ini juga mulai merubah pelayanan pastoral Gereja pada waktu itu. Gereja mulai terlibat dalam kehidupan sosial-politik secara lebih aktif. Teologi para pemimpin Gereja makin menjadi kritis, dan juga terjadi semacam "*de-westernisasi teologi*".

Gereja mulai merasa perlu untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat, bahkan yang di luar Gereja secara lebih utuh, bukan hanya secara spiritual, tetapi juga secara fisik, bukan hanya secara individual, tetapi juga secara kolektif. Orang-orang Kristen didorong untuk menjadi katalis di tengah proses-proses revolusioner menuju masyarakat yang dewasa dan modern (Simatupang, 1967: 48). Untuk itu, teologipun harus dikembangkan menjadi kritis

agar dapat merespon terhadap situasi jaman, melayani terhadap mereka yang mulai menjadi kurban dari proses modernisasi. Modernisasi dirasakan penting, tetapi tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan sosial (Simatupang, 1967: 67). Gereja juga makin disadarkan bahwa teologi mereka terlalu "berpusat ke Eropa, khususnya Belanda". Sejarah bagi bangsa Indonesia, menurut Simatupang, haruslah theo-sentrik, tetapi ia juga harus "Indonesia-sentrik", dan bukan "Eropa-sentrik". Orang-orang Indonesia tidak boleh beranggapan bahwa diri mereka adalah "orang-orang yang tidak mempunyai sejarah" di tengah-tengah penyerbuan kebudayaan Barat modern (Simatupang, 1967: 96-104).

Pendampingan pastoral yang dihasilkan dalam perubahan-perubahan semacam ini muncul secara khusus dalam buku-buku teologi praktika dan pastoral J. L. Ch. Abineno, professor STT Jakarta. Abineno mendukung teologi praktika dari A.D. Mueller, seorang teolog Jerman: "ajaran tentang pengrealisasian yang benar dari Kerajaan Allah di dalam Gereja dan oleh Gereja di dalam dunia" (Abineno, 1968: 33). Bagi Abineno, Gereja harus hidup untuk dunia, bukan untuk dirinya sendiri. Gereja harus

menjalankan tanggung jawabnya dalam hal-hal "sekuler", termasuk politik dan ekonomi (Abineno, 1968: 23). Dapat disimpulkan bahwa paradigma pastoral mulai berubah dari pendampingan pendeta untuk anggota jemaat menjadi pendampingan terhadap kehidupan Gereja secara menyeluruh dalam upaya menghadirkan Kerajaan Allah di dunia. Pendampingan pastoral bukan lagi *the science for individual ministry* melainkan *the science of the church life and the science of the church life in/for the world*.

4. DASAWARSA 70-AN SAMPAI SEKITAR PERTENGAHAN DASAWARSA 80-AN

Pada tahun 1969 pemerintahan Orde Baru memulai PELITA I, dengan tekanannya pada kestabilan politik dan ekonomi. Di tengah situasi inilah Gereja-gereja dan sekolah-sekolah teologi melalui Konsultasi tentang Teologi dan Pendidikan Teologi di Indonesia yang dilaksanakan di Sukabumi tahun 1970, menghasilkan apa yang disebut "Pergumulan Rangkap". "Pergumulan Rangkap" berarti: bergumul dengan usaha untuk melaksanakan kehendak Tuhan, dan bergumul dengan arah

perkembangan dunia di sekitarnya, sehingga sebagai Gereja yang tetap setia kepada Tuhannya, Gereja dapat melaksanakan panggilannya dengan cara yang penad dan bermanfaat (Nababan, 1971: 2).

Dalam perkembangan ini, ada beberapa akibat dalam pelayanan pastoral Gereja-gereja di Indonesia, antara lain: (1) mulai menekankan pentingnya praksis; (2) makin menyadari pentingnya kontekstualisasi teologi; (3) makin menyadari situasi pluralitas budaya dan agama yang amat menentukan pola-pola pelayanan; dan (4) pergumulan mengenai hubungan secara kritis dengan ideologi negara.

Pendidikan teologi yang menekankan pentingnya praksis dapat kita jumpai, misalnya dalam model yang dikembangkan oleh STT Jakarta yang mengirimkan para mahasiswanya untuk hidup di komunitas-komunitas yang menderita di Klender dan Cengkareng, melakukan pelayanan mereka di sana dan berrefleksi teologi berdasarkan pengalaman tersebut.

Pentingnya kontekstualisasi muncul dalam berbagai pemikiran para teolog, diwarnai juga dengan debat apakah Indonesia lebih baik memakai

“teologi pembangunan” atau “teologi pembebasan” (Yewangoe, 1987: 278-280; Steenbrink, 1989: 19-23).

Masalah pluralitas agama makin menjadi perhatian, dan berpuncak dengan munculnya SK no. 70 dan 77 Menteri Agama pada tahun 1978. Gereja mulai lebih menyadari pelayanan dan misi yang lebih inklusif, sekalipun masih banyak juga Gereja-gereja yang masih melaksanakan misi mereka secara sangat eksklusif dan merendahkan keberadaan kepercayaan-kepercayaan agama lain (Steenbrink, 1984: 16).

Masalah relasi Gereja dengan negara serta ideologinya, dimulai dengan diberlakukannya pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila) di sekolah-sekolah (1975), dan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) bagi hampir semua lapisan warga masyarakat Indonesia (1978). Gereja memang tidak (bisa) menolak lagi arah perkembangan ideologi politik di mana Pancasila sebagai asas tunggal bagi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat (1984), akan tetapi sempat terjadi pergumulan yang tidaklah *enteng*.

Dalam dunia pastoral, semua perkembangan tersebut juga

mempengaruhi pemahaman Gereja. Pemahaman tentang pelayanan pastoral juga makin "mendunia". Poltak Sormin, dalam orasi pengangkatannya sebagai guru besar teologi praktika di STT HKBP di Pematang Siantar, mengusulkan sebuah pandangan yang berbeda dari Abineno. Ketimbang menekankan pelayanan Gereja bagi dunia, Sormin menekankan bahwa pusat dari penyelamatan Allah adalah dunia. Jadi, pusat perhatian teologi praktika dan pelayanan pastoral bukanlah aktifitas Gereja, tetapi praksis orang Kristen dalam menghadapi situasi dan masalah-masalah sosial, kultural dan politik di dalam dunia ini (Sormin, 1974: 36-48). Dengan pendampingan pastoral seperti itu, Gereja akan menjadi Gereja yang peka, yang mampu melihat "tanda-tanda zaman" dan memproklamasikan bahwa Kristus tetap hadir dalam dunia sekarang ini. Karena itu Gereja tidak lagi berkata kepada dunia "datang dan jadilah seperti kami", tetapi Gereja mengatakan "Kristus besertamu di mana kamu berada". Maka struktur hubungan antara Allah, Gereja dan dunia bukan lagi: Allah-Gereja-Dunia, melainkan struktur: Allah-Dunia-Gereja.⁴

Perkembangan paradigma pendampingan pastoral sebagai respon terhadap makin menguatnya Pancasila sebagai ideologi negara ini makin terlihat nyata dari ungkapan-ungkapan yang lebih kemudian seperti pada tulisan T. B. Simatupang, misalnya, yang menyatakan bahwa tugas Gereja adalah "bersama-sama meletakkan landasan moral, etik, dan spiritual bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila menuju tinggal landas" (Simatupang, 1988: 21-46). Pada tahap ini dapat disimpulkan bahwa pendampingan pastoral berkembang dengan paradigma baru, bukan lagi menekankan *church life in the world* melainkan *religious/moral life in the world*.

Perlu dicatat, sekalipun pada tataran pemikiran teoretik tentang pendampingan pastoral telah berkembang sedemikian rupa sejak diterbitkannya pandangan Abineno di tahun 1968, namun tentu saja pada tataran praksis dapat dijumpai bahwa para pendeta belum beranjak dari pandangan lama yang lebih menekankan pendampingan pastoral sebagai pendampingan dari seorang pendeta jemaat bagi warganya. Para pendeta mungkin lebih mengikuti pola pastoral tulisan Bons-Storm (terbit 1976), yang (1)

masih sangat individualistik (pola *one-to one* dan dibatasi dinding-dinding Gereja), (2) tidak melibatkan diri di tengah masyarakat, (3) pelaksanaannya lebih oleh elite Gereja, ketimbang umat secara menyeluruh, serta (4) lebih merupakan 'model proklamasi' yang didominasi oleh pendekatan 'teologi terapan' yang memang telah mendominasi perkembangan pendampingan pastoral di Eropa.⁵ Model ini menekankan bahwa meskipun ilmu-ilmu humaniora seperti psikologi, sosiologi, ekonomi, hukum, antropologi, sejarah, politik, dsb, memiliki integritas sendiri dan mungkin bermanfaat untuk menjelaskan konteks di mana teologi akan diaplikasikan, akan tetapi ilmu-ilmu tersebut tidak memberikan pemahaman teologis apapun. Pemahaman teologis harus berdasarkan lebih kepada Alkitab semata-mata.⁶

5. PERTENGAHAN DASAWARSA 80-AN SAMPAI 1988

Perkembangan pada pertengahan dasawarsa 80-an menunjukkan bahwa teologi pastoral di Indonesia semakin berkembang dengan kecenderungan-kecenderungan menuju kepada "*doing theology*" yang menekankan aspek berteologi dari praksis.

Kecenderungan ini diperkuat selama dasawarsa berikutnya, bahkan sampai situasi kontemporer sekarang ini, melalui dikembangkannya beberapa model berteologi pastoral/praktika, antara lain: (1) Metode Studi Kasus (MSK); (2) Metode Teologi Fungsional; dan (3) Metode Pendidikan Pastoral Klinis (PPK).

Metode Studi Kasus (MSK) dipelopori oleh Tjaard Hommes yang memimpin Institute for Advanced Pastoral Studies dari ATESEA (Association For Theological Education in South East Asia), dengan program "Doctor of Pastoral Studies"-nya. (Hasil-hasilnya dapat dijumpai pada seri Metode Studi Kasus yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia: Sumut, 1985; Timor, 1990; dan Jawa, 1990).

Metode berteologi lainnya dikembangkan oleh teolog-teolog Roma Katholik, antara lain: J. B. Banawiratma, S. J.⁷ Pembaharuan pelayanan pastoral di kalangan Katholik sebenarnya telah dimulai sejak Konsili Vatikan II. Sebelum Konsili Vatikan II perhatian Gereja lebih dicurahkan pada hidup religius orang-orang beriman, dan kurang diberikan pada tugas umat Allah di tengah dunia.⁸ Setelah Konsili Vatikan II, dan terutama dengan

berkembangnya Teologi Pembebasan di Amerika Latin, Gereja lebih berusaha untuk secara aktif memperbarui dan mentransformasi umat manusia pada umumnya, melalui karya-karya umat di tengah-tengah hidup masyarakat.⁹ Perubahan ini dapat diamati dalam makin banyaknya karya-karya teologi mengenai solidaritas sosial dan perjuangan Gereja di tengah-tengah kemelaratan dan ketidakadilan. Sumbangan khas Banawiratma dalam semuanya ini adalah suatu model yang lebih kontekstual dan sistematis yang dapat diikuti langkah demi langkah dalam suatu pendidikan sosio-pastoral di Indonesia.

Metode Pendidikan Pastoral Klinis di Indonesia dikembangkan oleh Mesach Krisetya bersama dengan Aart Martin van Beek, dalam suatu kerja sama antara UKSW (Universitas Kristen Satya Wacana) dan PELKESI (Persatuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia) (van Beek, 1988: 312-320). Pendekatan klinis ini menghasilkan definisi pendampingan pastoral yang lebih mengadopsi "model terapeutik", didominasi oleh pendekatan "psikologi terapan", yang lebih mendominasi

perkembangan pendampingan psatoral di Amerika Utara.¹⁰

Keterbatasan tempat tidak memungkinkan kita untuk membahas perbedaan-perbedaan antara satu metode dengan metode yang lainnya, akan tetapi justru hanya memperhatikan bahwa metode-metode tersebut bertemu pada satu titik fokus: pengembangan suatu bentuk berteologi pastoral yang berangkat dari praksis, yang lebih bersifat empirik, dan yang lebih menekankan korelasi antara ilmu teologi dengan ilmu-ilmu humaniora lainnya. Pendampingan pastoral yang sedemikian itu membutuhkan metode pendekatan dialog mutual kritis seperti telah digambarkan dalam berbagai tulisan teolog Katolik, khususnya Banawiratma,¹¹ yang berbeda dari pendekatan sebelumnya yang menekankan satu arah: dari teori diaplikasikan ke praktek.

Kebutuhan Gereja akan pendekatan-pendekatan yang lebih empirik dalam pelayanan pastoral dalam perkembangannya terlihat makin menguat. Perkembangan teologi pastoral yang bersifat empiris, profesional, dan cenderung ke klinis tersebut memang harus diakui sangat didominasi oleh model-model yang lebih bersifat

sosiologis atau psikologis. Oleh karena itu tidak heran muncul tanggapan yang menekankan bahwa realitas kemelaratatan dan ketidakadilan dalam kehidupan sosial-ekonomi di Indonesia tak terpisahkan dari tradisi keagamaan. Jadi pendampingan pastoral-pun harus berkaitan erat dengan spiritualitas dan tidak boleh kehilangan identitas pastoralnya. Teologi dan spiritualitas adalah dua dimensi dari satu keseluruhan yang integral/utuh (Imbelli dan Groome, 1992: 127-137).

6. PERKEMBANGAN TERAKHIR TAHUN 1998 SAMPAI KINI

Ada dua isu pokok yang menjadi tantangan dalam tahun-tahun terakhir ini, yaitu masalah hubungan antar agama dan masalah lingkungan hidup.

Ada perubahan besar yang telah terjadi di Indonesia sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Munculnya Era Indonesia Baru mengakibatkan banyak perubahan dalam hubungan antar agama di Indonesia dan dengan demikian juga perubahan sikap di kalangan Gereja-gereja. Harus diakui, dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, peranan Gereja-gereja dalam kehidupan sosial politik belumlah signifikan yang

diharapkan oleh Gereja-gereja, bahkan Eka Darmaputera salah satu teolog yang berkecimpung cukup lama di Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia mensinyalir terjadinya proses insignifikansi Gereja di tengah kehidupan sosial politik Indonesia.¹² Secara khusus, dalam gerakan Reformasi sampai munculnya era Indonesia Baru-pun, peranan Gereja-gereja dapat dipertanyakan. Pepatah "ayam berkokok karena fajar menyingsing" barangkali tepat untuk menggambarkan perubahan sikap yang terjadi di kalangan Gereja-gereja dalam menyambut munculnya Era Indonesia Baru, ketimbang sebaliknya.

Dalam situasi tersebut Gereja-gereja di Indonesia menghadapi tugas berat untuk menghadirkan diri kembali dengan secara pas. Tantangan yang muncul adalah bagaimana Gereja-gereja menghadapi hubungan antar agama yang jelas-jelas telah sangat berbeda sifat dan nilai-nilainya sejak konflik dan kekerasan antar agama merebak di berbagai wilayah Nusantara. Konflik antar agama di Indonesia ini pada masa Orde Baru biasanya diselesaikan cara tertutup dengan memberikan pengarahan, penyuluhan, dan penyadaran lisan. Jargon

kerukunan antar umat beragama dipaksakan oleh pihak penguasa, yang memang mempunyai kekuasaan yang amat besar, berdasarkan Pancasila sebagai satu-satunya azas berbangsa dan bernegara yang menjadi platform yang diakui bersama, untuk menyelesaikan konflik. Dengan demikian yang terjadi adalah suatu bentuk penyelesaian kompromi semu, tidak demokratis, dan dipaksakan untuk harmonis oleh penguasa ini justru mendorong kedaulatan organisasi keagamaan ke titik nadir dan mengangkat kekuasaan negara ke titik zenit yang absolut (Suwondo, 1999: 204-206).

Pada masa pemerintahan Gus Dur saat ini, telah muncul pendekatan yang berbeda. Pemerintah mulai membiarkan interaksi dan konflik antar agama terjadi secara wajar dan demokratis tanpa harus diatur, diarahkan dan diawasi. Pihak penguasa hanya melakukan kontrol terhadap adanya tindakan yang melanggar hukum, karena konflik dianggap sesuatu yang alamiah dan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Dengan demikian diharapkan interaksi dan konflik yang lebih demokratis, akan lebih diusahakan sedemikian rupa dan memunculkan

kesadaran bersama dan pengakuan bersama akan adanya hak dan kekuasaan dari masing-masing pihak (pembagian kekuasaan secara seimbang). Ini merupakan pendekatan yang dianggap lebih baik, meskipun bisa diragukan keefektifannya, manakala eskalasi konflik sudah sampai pada tahap kekerasan bersenjata yang begitu parah seperti yang terjadi di Maluku Utara.

Yang jelas, situasi konflik tetap potensial pada hubungan antar agama di Indonesia. Pada dasarnya sektarianisme agama berpijak pada kesadaran bahwa seolah-olah hanya agama yang dianutnyalah yang paling benar. Menurut Sumartana hubungan konfrontatif antar agama yang berbeda akan membawa akibat yang bertentangan dengan seluruh misi agama, dan akan "menikam dari belakang" seluruh panggilan kemanusiaan yang luhur dari agama. Agama akan cenderung menolak kehadiran agama lain, "menobatkannya", bahkan kalau punya kekuasaan akan mengeliminasi agama lain. Pola pikir semacam ini selalu muncul dari semua institusi keagamaan, walaupun dengan intensitas yang bervariasi (Sumartana, 1994: 72-73).

Jelaslah, tantangan yang mendesak Gereja-gereja adalah untuk mengikis pandangan-pandangan yang secara fanatik menganut pola pikir di atas, dan memupuk kesediaan untuk menonjolkan panggilan kemanusiaan yang luhur dari agama itu sendiri. Dengan demikian Gereja perlu mengubah praktek pendampingan pastoral yang tidak sehat dalam pengembangan solidaritas kehidupan keberagamaan bersama dan mengembangkan paradigma baru yang dapat menjawab tantangan di atas.

Isu kedua yang dihadapi oleh pendampingan pastoral di Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini adalah mengenai masalah lingkungan hidup. Di tataran internasional kesadaran mengenai ekoteologi sudah sedemikian berkembang. Namun dalam perkembangan pendampingan pastoral, hal ini masih merupakan isu yang baru. Isu ekologi dan kaitannya dengan pendampingan pastoral sudah didiskusikan oleh Howard Clinebell, teolog Amerika Utara yang dianggap sebagai tokoh yang paling berpengaruh dalam pengembangan disiplin ilmu pendampingan pastoral kontemporer, mengingat bahwa

dunia saat ini menghadapi krisis keadilan-ekologis tersebut, yang pada dasarnya terdiri dari dua proses global yang saling bergantung: degradasi lingkungan alam, dan kemiskinan yang mendehumanisasi kehidupan disebabkan oleh ketidakadilan sosial yang masif.¹³

Pembahasan isu ekologi dalam pendampingan pastoral cukup penting untuk situasi di Indonesia masa kini. Isu ini merupakan titik pijak bersama yang diakui sebagai isu signifikan oleh berbagai pihak: kelompok agama, pengambil kebijakan publik, LSM, dsb. Isu ini bisa menjadi platform untuk membangun pendampingan pastoral yang lebih relevan dan berkaitan dengan isu hubungan antar agama yang sudah kita bahas tadi. Pendampingan pastoral masa kini perlu menjawab tantangan untuk memasukkan dimensi krisis keadilan ekologis ini dalam paradigmanya.

Sebagai kesimpulan, agaknya pendampingan pastoral di Indonesia menuju perkembangan ke arah upaya untuk mampu menjawab tantangan-tantangan yang semakin bersifat kontekstual dan publik. Hal ini rupanya paralel dengan situasi yang berkembang

di dataran Internasional. Kutipan dari Larry Graham di bawah ini dapat memperjelas hal tersebut:

In the last fifteen years, pastoral theology has discovered social and cultural "location", and has gone contextual and "public". Through the rise of feminist and womanist consciousness ... family therapy and other systems analysis, intercultural conversations with pastoral caregivers around the globe, liberation and other political theologies, the ecological crisis, and greater clarity about a variety of oppressive structures, the field of pastoral theology and care have expanded its theory and practice to interpret and engage the larger world. Indeed, Bonnie Miller-McLemore, one of the leaders in the field, characterizes pastoral care and counseling as moving from exclusive focus upon "living human document" to attend also to the "living human web".¹⁴

7. PROPOSAL PEMAHAMAN BARU PENDAMPINGAN PASTORAL

Bertolak dari perkembangan di atas, barangkali satu definisi yang dapat disusun untuk membantu mencari jalan ke masa depan untuk memiliki pendampingan pastoral yang mampu menjawab tantangan-tantangan jaman seperti di atas adalah sebagai berikut:

Pendampingan pastoral adalah upaya integratif komunitas Kristen yang bergumul bersama-sama dengan komunitas umat lain di tengah-tengah keprihatinan masa kini yang muncul dalam situasi sosial politik, budaya dan lingkungan hidup mereka dengan tujuan untuk mengurangi akibat dosa dan penderitaan, dan mentransformasi hidup sesuai dengan harkat kemanusiaan.

Ada beberapa elemen penting dalam definisi tersebut:

A. Pendampingan pastoral dideskripsikan sebagai upaya, sebab memang penting untuk menekankan hakekat pendampingan pastoral yang sangat praktis atau "operation-centred" (Pattison, 1988: 14). Tanpa harus terjatuh dalam bahaya pragmatisme pastoral di antara para pekerja pastoral yang menunjukkan seolah-olah pendampingan pastoral hanya sekedar aktivisme¹⁵ tanpa refleksi mendalam, kita menolak kecenderungan lain kepada kepasifan dan nir aksi yang justru sering menjadi gambaran menyedihkan dari kualitas pelayanan pastoral gereja-gereja di Indonesia secara umum.¹⁶

- B. Pelaksana pendampingan pastoral juga ditegaskan, yaitu 'Komunitas Kristen,' bukan hanya elite/pemimpin jemaat saja. Dalam pemahaman semacam ini pendampingan pastoral merupakan bentuk/praksis dari proses 'berteologi praktika' oleh segenap umat beriman (bukan sekedar 'pastoral' dalam arti sempit yang berpusat pada pastor/pendeta), yang menangani strategi-strategi gereja dalam menciptakan dan mempengaruhi struktur-struktur pendampingan dalam masyarakat, yang sebagian besar justru sekuler.¹⁷ Kalau demikian, bagaimanakah hubungan antara umat dan pemimpin umat? Hal itu akan dibahas secara khusus nanti, namun untuk saat ini cukuplah ditegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh para pemimpin dan teolog di gereja bukan lagi untuk jemaat, melainkan, dalam konteks bersama-sama dengan jemaat. Pemimpin jemaat bisa saja menjadi inisiator dalam sebuah proses, tetapi mereka pasti tidak akan melaksanakannya sendiri, mereka akan selalu lebih merupakan fasilitator, di mana partisipasi dan bahkan kendali akan diusahakan sedapat-dapatnya di tangan warga jemaat.
- C. Istilah 'komunitas Kristen' mengandung pengertian yang luas. Ada 4 level tercakup di dalamnya: 1) perorangan/ individu Kristen (karena individu adalah sistem yang kompleks dengan kisah hidupnya yang unik, yang merupakan akumulasi dari interaksinya dengan orang lain dan sebagai organisme dari sub-bagian masyarakat); 2) sistem hubungan-hubungan mendasar (keluarga, teman-teman); 3) sistem hubungan yang lebih luas (tetangga, desa, negara, kelas ekonomi, kelompok etnis, dsb); dan 4) Tuhan (menunjuk kepada "komunitas yang paling universal yang dapat dibayangkan oleh seseorang" (Poling, 1983: 131-136). Dari empat level tersebut, yang paling ditekankan dalam tulisan ini adalah komunitas Kristen dalam level jemaat gereja lokal tertentu atau orang-orang Kristen pada daerah lokal tertentu. Dalam

pendampingan pastoral, komunitas gereja lokal dan komunitas orang-orang Kristen lokal (dari berbagai gereja) adalah komunitas yang biasanya paling banyak menghadapi isu-isu konkret yang terjadi di tengah situasi sosial politik dan budaya masyarakat luas. Meskipun demikian, respons pribadi tertentu sebagai bagian dari komunitas Kristen dan respons komunitas kristen pada level yang lebih luas pada level nasional, bahkan internasional, misalnya, tidak perlu dibuang.

- D. Cakupan atau ruang lingkup pendampingan pastoral bersifat luas: pelayanan yang tanggap terhadap situasi sosial politik budaya di luar batas 'dinding-dinding gereja,' dan bukan sekedar situasi hidup anggota jemaat saja, meskipun tentu saja tanpa mengabaikan pelayanan di dalam batas 'dinding-dinding gereja' tadi. Jelas pendampingan pastoral dengan cakupan meluas ini tidak membatasi pendampingan pastoral kepada individu-individu saja. Banyak dosa, penderitaan, dan kemampuan untuk perubahan hidup berakar

justru di luar individu. Sepanjang sejarah, para pendamping pastoral telah berkali-kali menjumpai bahwa mau tidak mau diri mereka harus terlibat dalam permasalahan sosial politik yang menyangkut struktur-struktur dan orang banyak sebagai salah satu bentuk pelayanan yang paling penting dan efektif. Pemakaian istilah "pastoral" yang luas cakupannya ini menantang kecenderungan simplistik untuk menyamakan pendampingan pastoral dengan konseling pastoral, suatu bahaya yang menjadi ciri dari gerakan pendampingan pastoral di Amerika Utara pada tahun 1960 an dan awal 1970 an, seperti yang sedikit telah disinggung di atas.

Pendekatan yang ditekankan adalah pendekatan holistik yang mengakui keterbatasan yang ada dalam berbagai disiplin ilmu dan menekankan pentingnya dialog yang kritis dan mutual. Pendampingan pastoral bukan penerapan dari teori-teori teologis (teori-ke-penerapan) yang mengabaikan sumbangan ilmu-ilmu humaniora/sosial¹⁸; juga bukan pula didominasi oleh

ilmu-ilmu humaniora/sosial yang mengabaikan teologi sama sekali (dari praksis ke teori)¹⁹; melainkan hasil dialog mutual kritis antara teologi dan ilmu-ilmu humaniora/sosial. Di mana praktek-praktek kultural (yang dipahami melalui ilmu-ilmu humaniora).

Tujuan pendampingan pastoral dicoba untuk didefinisikan secara lebih menyeluruh. Pendampingan pastoral bukanlah sekedar bersifat kuratif (untuk menyelesaikan masalah),²⁰ seperti yang secara keliru sering terlalu ditekankan oleh mereka yang menyamakan pendampingan pastoral dengan konseling pastoral. Pendampingan pastoral perlu merespon juga pertumbuhan yang positif, lebih bersifat *preventif* (pencegahan) atau *melioratif* (pemeliharaan dan peningkatan yang sudah baik), seperti yang ditekankan oleh Howard Clinebell, dengan istilah "*nurturing*"nya.²¹ Jadi, pendampingan pastoral tidak lagi terlalu terfokus pada "*problem oriented*." Ia menjadi "*human oriented*" secara lebih utuh. Ungkapan "mentransformasi hidup sesuai dengan harkat kemanusiaan" dalam definisi di atas ingin menekankan dimensi pertumbuhan ini, suatu

pertumbuhan yang sesuai dengan visi universal maupun teologi Kristen. Visi teologis pendampingan pastoral ini perlu kita jelajahi lebih lanjut dalam bagian berikutnya.

8. DASAR-DASAR TEOLOGIS PENDAMPINGAN PASTORAL

Pendampingan Pastoral bukan sekedar aktivisme yang didasarkan kepada pengalaman bertahun-tahun yang telah terbukti memberikan hasil yang positif. Pendampingan pastoral perlu merupakan hasil dari proses berteologi praktika yang dilaksanakan oleh komunitas Kristen yang mencoba setia kepada panggilannya di dalam Yesus Kristus, menggumuli keprihatinan-keprihatinan masa kini iman mereka di tengah-tengah konteks sosial, politik dan budaya mereka.

Richard P. McBrien, seorang teolog Roma Katholik menguraikan suatu teologi pelayanan yang melihat pelayanan dapat dilakukan pada 4 level:

1. Umum/universal yaitu pelayanan yang dilakukan oleh setiap manusia terhadap sesama manusia yang membutuhkannya. Suatu pelayanan yang berakar pada kemanusiaan/humanitas. Misalnya: demonstrasi

- melawan senjata nuklir, membantu orang yang kelaparan, membantu korban bencana alam, dsb.
2. Umum/spesifik yaitu pelayanan untuk sesama manusia yang dilakukan oleh profesi pertolongan seperti: perawat, pekerja sosial, bantuan hukum, pengobatan, dsb. Pelayanan ini berakar pada kemanusiaan, namun juga kompetensi tertentu yang membutuhkan validasi tertentu seperti lisensi keprofesionalan oleh yang berwenang.
 3. Kristen/universal yaitu pelayanan kepada sesama yang dilakukan di dalam Kristus dan oleh karena Kristus. Pelayanan ini berakar pada baptisan setiap anggota gereja. Pelayanan umum/universal yang dilaksanakan oleh seorang Kristen dapat dikatakan merupakan pelayanan Kristen/universal ini jika dilakukan dengan motif-motif Kristen secara eksplisit.
 4. Kristen/spesifik, yaitu pelayanan untuk sesama di dalam Kristus dan oleh karena Kristus, atas nama gereja dan demi membantu gereja melaksanakan misi-
- Nya. Ini merupakan pelayanan yang ditetapkan oleh gereja, yang dilakukan hanya oleh orang-orang tertentu. Seorang Kristen yang mengunjungi orang sakit atas prakarsanya sendiri, melakukan pelayanan Kristen/universal, tetapi orang Kristen yang mengunjungi orang sakit sebagai bagian dari tugasnya dalam Tim Visitasi Gereja, melakukan pelayanan Kristen/spesifik (McBrien, 1987: 11-12).
- Pendampingan pastoral memang menerima, menghargai serta menjadi bagian dari naluri instinktif kemanusiaan untuk memperhatikan dan merawat sesama yang dikasihinya, yang sedang menderita oleh karena suatu ancaman tertentu terhadap keberadaannya, baik sakit penyakit, kesedihan, kematian, ketakutan, dsb. Secara konkret manusia saling menghibur dan saling meringankan rasa sakit.²² Namun, pendampingan secara naluriah kemanusiaan saja tidak cukup, sebab: a) Gereja sebagai institusi keagamaan memiliki kekhususan yang berbeda dari sekedar agen kemanusiaan lain; dan b) "tugas kebaikan secara umum terhadap sesama manusia" merupakan konsep

yang belum didefinisikan dan tidak cukup tajam untuk mampu menjadi dasar yang mengarahkan dan membimbing seluruh kegiatan Kristen yang diarahkan secara khusus untuk pelayanan pastoral. Konsep tersebut lebih sekedar bersifat reaktif dari pada proaktif - menanggapi kebutuhan manusia sewaktu kelihatan jelas bahwa hal-hal tersebut mulai menjadi ancaman kehidupan, tetapi tidak pernah sungguh-sungguh prihatin untuk mencegah menguatnya kebutuhan-kebutuhan tersebut.²³

Pendampingan pastoral, kalau demikian, perlu didasarkan kepada motivasi dan keyakinan iman Kristen yang justru melihat Yesus Kristus sebagai bentuk konkret pendampingan Allah terhadap umat manusia. Mendasarkan diri pada motivasi dan keyakinan iman Kristen bukan berarti hanya "bersemangatkan" iman Kristen, melainkan dalam seluruh upayanya pendampingan pastoral seharusnya didahului dengan upaya berefleksi teologis Kristen yang kokoh. Eksistensi teologi Kristen didasarkan sepenuhnya pada realitas Yesus Kristus yang telah berinkarnasi, disalibkan, dan bangkit, dan yang melaluinya kerajaan Allah telah dinyatakan. Pendampingan

pastoral sebagai hasil dari upaya berteologi praktika juga harus didasarkan pada dasar yang sama. Pendampingan pastoral menjadi bentuk atau ekspresi dari umat Kristen yang melaksanakan kesetiaan mereka terhadap Kristus. Jelaslah, pendampingan pastoral bentuk pelayanan pada level 3 dan 4 dari penjelasan McBrien di atas.

Dalam perspektif teologis di atas, konsep proklamasi kerajaan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus menjadi amat penting untuk pendampingan pastoral. Yesus Kristus adalah "pendobrakan yang menentukan dari kerajaan Allah ke dalam sejarah manusia" (Snyder, 1991: 147). Di dalam hidup, ajaran, dan secara khusus: kematian dan kebangkitan Kristus, kerajaan Allah telah didemonstrasikan dan dimanifestasikan di tengah-tengah sejarah. Kerajaan Allah kini hadir di tengah-tengah sejarah dan terus bergerak dalam antisipasi mencapai kepenuhannya. "Gerakan sejarah menuju kulminasinya dalam kerajaan Allah adalah sebuah gerakan yang mengikuti pola kematian dan kebangkitan Kristus."²⁴

Gereja atau umat Kristen yang melaksanakan kesetiaan mereka terhadap Kristus, hidup pada masa kini di antara dua waktu

tadi: manifestasi kerajaan Allah yang sudah hadir di tengah-tengah sejarah di dalam diri Yesus Kristus, dan kepenuhan kerajaan Allah yang masih mendatang. Gereja melaksanakan kesaksian iman dengan memperhatikan tiga dimensi kerajaan Allah tersebut: masa lalu dengan pernyataan Allah yang normatif, masa depan dengan pengharapan eskatologis terhadap kepenuhan kebenaran Allah pencipta dan penyelamat, dan masa kini dengan perjumpaan (*encounter*) terhadap kuasa Allah yang senantiasa memperbarui. Dimensi masa kinilah yang menjadi perhatian terutama dari pendampingan pastoral. Godaan untuk mengurangi pentingnya dimensi masa kini harus diwaspadai oleh gereja. Masa kini jangan sampai menjadi sekedar lanjutan/perluasan dari masa lalu, atau sekedar waktu untuk pengulangan tradisi atau dogma tertentu. Masa kini juga jangan sampai dianggap hanya titik awal dari masa depan, yang tidak bermakna dibanding cerahnya gambaran pengharapan yang baru, atau sesuatu yang akan lenyap begitu saja ke dalam keabadian. Masa kini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk menjumpai manusia dalam

keberadaannya secara khusus. Memang kita adalah produk dari masa lalu, dengan pengharapan dan ketakutan kita terhadap masa depan, namun masa kini adalah realitas yang tidak dapat dibuang menjadi sia-sia.

Semuanya ini adalah untuk mengatakan bahwa pendampingan pastoral lebih berurusan dengan realitas "masa kini." Pendampingan pastoral merupakan wujud nyata "teologi masa kini yang terbuka." Ia menjadi upaya berteologi dengan perhatian utamanya adalah mengenali kehadiran Allah di dalam dan melalui keprihatinan-keprihatinan masa kini, yang berlokasi pada waktu dan tempat yang khusus.

Sebagai upaya "teologi masa kini yang terbuka," peranan interpretasi teologis dalam pendampingan pastoral menjadi sesuatu yang amat krusial. Pendampingan pastoral membutuhkan kemampuan umat Kristen untuk berefleksi mengenai eksistensi dan aksi-aksinya dalam hubungannya dengan kehadiran dan aksi Allah yang berkesinambungan dalam sejarah (sejak dari aksi Allah yang tergambar dalam Kitab Suci, melalui sejarah gereja dengan tradisi-tradisinya, maupun masa kini dan masa yang akan datang). Dalam

hubungan antara umat Allah dengan Allahnya tersebut muncullah dua aspek: deskriptif dan normatif. Yang deskriptif adalah kenyataan bahwa Allah adalah pencipta dan dunia adalah karya penciptaan dan penyelamatan Allah. Yang normatif adalah tuntutan agar ciptaan Allah selalu berpaling kepada sang penciptanya. Di antara yang *what is* dan *what ought* inilah terletak dialektika hubungan manusia dengan Allah. Hubungan dialektis ini adalah dialektika kasih. Allah, seperti yang dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus, adalah Allah yang mengasihi dan karenanya menyelamatkan manusia. Sebagai jantung alam semesta ini, yang mengikat semua relasi di dalamnya adalah kekuatan kasih Allah. Jantung teologi praktika pendampingan adalah justru dalam keterbukaannya terhadap realita masa kini dan perjumpaan dengan Allah sebagai kasih. Jelaslah, pendampingan pastoral sebagai bagian teologi praktika tidaklah berarti teologi yang berurusan hanya dengan hal-hal praktis. Ia merupakan teologi praktika bukan karena terutama memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pragmatis, melainkan karena ia mengarahkan kita terutama untuk mengenali

Kristus di tengah-tengah kehidupan kita sebagai Sang Pemberi Makna dan Arah dalam hidup kita. Jadi, inti pendampingan pastoral adalah upaya teologis untuk terlibat dalam realitas masa kini dengan bertanya: "Apakah hakekat eksistensi dan ketaatan Kristen di sini, pada situasi ini, kini, dan di tempat ini."²⁵ Pendampingan pastoral, meminjam ungkapan Bonhoeffer bertanya: "Siapakah Yesus Kristus sesungguhnya bagi kita, kini?"

Karakter interpretatif dari refleksi teologis yang mewarnai pendampingan pastoral seperti digambarkan di atas menjadikan pendampingan pastoral sebagai teologi hermeneutik. Pada titik inilah pendampingan pastoral sebagai respon umat Kristen terhadap keprihatinan yang muncul di tengah situasi sosial politik masyarakatnya, menjadi salah satu bentuk berteologi kontekstual seperti yang menjadi dambaan kita selama ini.²⁶ Sambil menunggu munculnya teologi kontekstual yang lebih komprehensif di Indonesia, respons pendampingan pastoral yang dipahami sedemikian ini diharapkan membantu umat Kristen untuk mengatasi masalah kontekstualisasi.²⁷

9. PEMAMPU: PERANAN

UTAMA PEMIMPIN JEMAAT DALAM PENDAMPINGAN PASTORAL MASA KINI

Pemahaman pendampingan pastoral yang menekankan bahwa pelaksanaannya adalah seluruh komunitas Kristen dan bukan hanya para elite/pemimpin Gereja saja, mempunyai implikasi bahwa peranan para pemimpin Gereja perlu dirumuskan lebih tajam. Dalam hal ini saya mengusulkan citra PEMAMPU.²⁸ Citra 'pemampu' berkaitan erat dengan citra 'komunitas'. Dalam 'komunitas' terkandung dimensi kepelayanan maupun dimensi pemuridan. Orang Kristen dipanggil untuk melayani sama seperti Kristus melayani, dengan tujuan membentuk 'komunitas orang-orang yang dikasihi Tuhan'. Pembentukan komunitas semacam ini membutuhkan gaya pendekatan yang fasilitatif, tidak hierarkhis dan/atau otoriter, melainkan inklusif dan mawas diri. Orang Kristen juga dipanggil untuk taat kepada panggilan Tuhan dan mengambil resiko yang mungkin terjadi dalam ketaatannya tersebut. Pembentukan komunitas yang memiliki komitmen terhadap tujuan-tujuan yang seringkali tidak mudah dibayangkan ini membutuhkan pendekatan yang menekankan kesetiaan, teladan,

dan kualitas-kualitas personal yang integratif. Dalam kaitan inilah citra 'pemampu' menolong kita untuk menghayati peranan kita.

Sebagai pemampu berarti Majelis Jemaat berperan untuk melibatkan seluruh anggota komunitas, terutama mereka yang tersingkir seperti para jelata melarat, yang tertindas, ataupun yang dieksploitasi oleh orang-orang lain, agar mereka dapat dimampukan untuk melaksanakan tugas panggilan mereka secara utuh sebagai orang-orang yang beriman. Dengan demikian pendampingan pastoral menjadi "upaya pendampingan terhadap suara-suara yang tak terdengar dari kehidupan pribadi maupun komunitas demi transformasi iman yang berkesinambungan" (Poling, 1991: 187). Pendampingan pastoral tidak lagi dibatasi untuk para elite. Apa yang dilakukan oleh para pemimpin dan teolog di Gereja bukan lagi untuk jemaat, melainkan, dalam konteks bersama-sama dengan jemaat. Majelis jemaat bisa saja menjadi inisiator dalam sebuah proses, tetapi mereka pasti tidak akan melaksanakannya sendiri, mereka akan selalu lebih merupakan fasilitator, di mana partisipasi dan bahkan kendali

akan diusahakan sedapat-dapatnya di tangan warga jemaat.

10. CITRA PEMAMPU DAN IMPLIKASINYA BAGI PENDAMPINGAN PASTORAL INDIVIDUAL

Ada beberapa implikasi dari citra pemampu sebagai perwujudan paradigma baru pendampingan pastoral, meliputi pendampingan pastoral individual, pendampingan pastoral komunitas, maupun pendampingan pastoral masyarakat luas. Dalam pendampingan pastoral individual implikasinya sebagai berikut:

Majelis Jemaat perlu menstrukturkan pengalaman jemaat agar mereka bertumbuh dalam kesadaran, kesediaan dan kemampuan mereka untuk melaksanakan pendampingan pastoral satu terhadap yang lain (*peer-caring/peer-counseling*).

Bentuk konkret dari hal ini berupa: komunikasi mengenai kebutuhan pelayanan yang muncul di antara jemaat, membentuk tim visitasi pastoral yang kuat, menginformasikan keberadaan tim tersebut kepada jemaat, menolong warga jemaat untuk menyadari karunia dan kemungkinan (pelayanan) yang dapat mereka lakukan dalam

pelayanan tersebut, memberikan orientasi dan pelatihan yang membantu warga jemaat yang ingin terlibat dalam pelayanan tersebut, serta membuat sistem rujukan dan tindak lanjut yang memadai.

Jelas dibutuhkan *internal-network* yang cukup kuat untuk melaksanakan semua tugas di atas, namun juga *external-network* yang memadai untuk mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang akan muncul dalam pelayanan semacam itu. *External-network* tersebut seyogyanya merupakan kerja sama oikumenis dengan gereja-gereja lokal lain maupun dengan lembaga-lembaga pelayanan masyarakat (Kristen maupun non-Kristen) lainnya.

Pemimpin Jemaat tidak hanya menolong dan memampukan warga jemaat untuk melakukan pendampingan pastoral, tetapi mereka sendiri perlu terlibat secara pribadi dalam pelaksanaan program visitasi yang terpadu.²⁹ Masih dibutuhkan kehadiran diri Gereja dan majelis jemaat selaku *eksemplaris* atau teladan, khususnya secara moral dan spiritual. Teladan semacam ini merupakan kunci kesuksesan pelaksanaan pelayanan pastoral jemaat.³⁰

11. CITRA PEMAMPU DAN IMPLIKASINYA BAGI PENDAMPINGAN PASTORAL KOMUNITAS JEMAAT

Banyak dari pelayanan ini akan bertumpung tindih dengan pendampingan pastoral individual, tetapi kesehatan secara kolektif mempunyai dimensi lain yang membutuhkan penanganan khusus. Ada beberapa hal bisa dikemukakan dalam kerangka ini.

Pendampingan pastoral komunitas berhubungan secara dialektis dengan ritual-ritual dalam kehidupan yang dalam kehidupan berjemaat biasanya ditampung dalam bentuk ibadah-ibadah tertentu. Fungsi-fungsi pendampingan dijalankan melalui ritual baik untuk memberikan ketertiban, menguatkan makna, memberikan ikatan kesatuan sebagai komunitas, menangani ambivalensi kehidupan, maupun untuk menghadapi misteri hidup (Ramshaw, 1987: 22-54). Majelis Jemaat perlu menggumuli kembali seberapa jauh ritual-ritual yang ada telah difungsikan dalam pendampingan pastoral komunitas. Perhatian secara khusus perlu diberikan untuk ritual-ritual tahap kehidupan (*life cycle*). Sebagai contoh: upaya

kontekstualisasi ritual slametan 3, 7, 40, 100, dan 1000 hari meninggalnya seorang anggota keluarga dalam tradisi Jawa, akan sangat bermanfaat bagi pendampingan pastoral komunitas.³¹ Selain menggumuli ritual-ritual kehidupan yang belum 'diibadahkan' di Gereja atau yang belum dimanfaatkan bagi pendampingan pastoral, Majelis Jemaat barangkali juga perlu menggumuli tahap-tahap kehidupan tertentu yang belum direspons dengan ritual tertentu. Misalnya: di sebuah Gereja USA ada ibadah pengucapan syukur mendapatkan SIM mengendarai mobil untuk pertama kali, karena hal itu merupakan peralihan tahap kedewasaan tertentu yang dirasakan cukup signifikan oleh para warga jemaat. Dalam pergumulan-pergumulan ini citra Majelis Jemaat sebagai pemampu amat menentukan, karena kontekstualisasi yang berhasil memiliki kunci: kepekaan terhadap bentuk-bentuk religius populer dari rakyat. Warga jemaatlah pelaku utama dalam berrefleksi, yang paling dapat menghayati mana-mana bentuk yang perlu dikontekstualisasikan dan mana-mana tahap kehidupan yang perlu direspons melalui ritual tertentu (cf. Schreiter, 1993: 202ff).

Jelaslah, perlu kerja sama antara Majelis Jemaat dengan segenap warga untuk merancang ibadah yang tepat, dengan pemakaian simbol, tindakan, ritus, dsb yang benar-benar akan bermakna dan membantu pertumbuhan hidup beriman warga jemaat. Ibadah umat menjadi benar-benar '*crucial event*' dalam kehidupan jemaat, di mana pendampingan Roh Kudus terhadap jemaat Tuhan ditawarkan.

Kotbah adalah saluran pendampingan pastoral yang amat penting. Majelis Jemaat perlu membantu dengan serius bagaimana hal ini dapat terwujud.³² Majelis Jemaat diharapkan bukan hanya pemampu bagi warga jemaat, tetapi juga pemampu bagi para pengkotbah/pendeta, agar mereka benar-benar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Kelompok kecil baik kelompok persekutuan doa atau kelompok *bible-study* di luar ibadah Minggu biasanya jauh lebih memungkinkan jemaat untuk melakukan pendampingan pastoral.

Acara-acara kekeluargaan yang mengundang anggota-anggota Gereja yang biasanya justru kurang saling mengenal satu sama lain, akan sangat

membantu proses keakraban dan saling memperhatikan satu sama lain.

12. CITRA PEMAMPU DAN IMPLIKASINYA BAGI PENDAMPINGAN PATORAL MASYARAKAT

Pendampingan pastoral terhadap masyarakat luas bermaksud menghadirkan Kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Gereja sebagai institusi melibatkan diri di tengah-tengah kehidupan masyarakat umum dan memiliki keprihatinan terutama terhadap nasib mereka yang *marginalized*, melarat, dan menderita (Cf. Banawiratma, 1990: 25-44). Keterlibatan ini tidak meniadakan keterlibatan secara aktif anggota-anggotanya secara individual yang bagaikan 'garam mengasinkan dunia' di tengah-tengah pelayanan bagi sesamanya.

Dalam pendampingan pastoral terhadap masyarakat luas di tengah situasi sosial-politik-budaya yang khas, yang ditekankan adalah isu-isu pokok setempat/lokal, tanpa meninggalkan kemungkinan bahwa Gereja setempatpun bisa membantu untuk menghadapi masalah-masalah pada level nasional yang seyogyanya dihadapi melalui jaringan kerja pada level nasional (PGI, KWI,

dsb). Di lain pihak, kerap kali isu-isu lokal tertentu perlu diangkat pada level nasional dan jaringan kerja pada level nasional lebih banyak membantu. Apa implikasi dari citra pemampu bagi pendampingan pastoral masyarakat semacam ini? Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan.

Pemimpin jemaat perlu membantu warga jemaat untuk benar-benar terlibat dalam realita situasi sosial-politik-budaya masyarakat di sekitarnya dan 'melihat' adanya kebutuhan pelayanan tertentu. Dalam masalah AIDS misalnya, berapa banyakkah Gereja lokal kita yang melihat pentingnya pelayanan terhadap korban/ penderita AIDS dan memberikan pelatihan konseling untuk menyambut boom penderita AIDS di sekitarnya, bahkan di antara warga jemaat sendiri? Contoh lain: bagaimana Gereja menanggapi penggusuran para pedagang kecil untuk proyek pembangunan supermarket raksasa yang masuk di kota mereka? Atau terhadap lingkungan yang tandus yang menyebabkan sebagian besar warga melaksanakan urban musiman menjadi kuli di kota lain? Bagaimana Gereja lokal menanggapi brutalnya penjahat

di daerahnya dan lemahnya pelaksanaan tugas aparat keamanan? Bagaimana dengan lemahnya kesadaran masyarakat mengenai lingkungannya? dan masih banyak lagi.

Untuk mampu 'melihat', warga perlu distrukturkan melalui pengalaman tertentu.³³ Proses konsientisasi ini menjadi tanggung jawab majelis jemaat. Yang dapat dilakukan oleh Majelis Jemaat adalah mengajak warga jemaat bersama-sama menggumuli prioritas pelayanan bersama tersebut, memfasilitasi proses tersebut secara terencana dengan berbagai informasi (kultural maupun teologis)³⁴ yang akan membantu warga jemaat bersama-sama ikut dalam proses berteologi, dan penyusunan program aksi pastoral yang dapat menjawab tantangan pelayanan tersebut.

Apabila jemaat bersama-sama telah melihat prioritas pelayanan tertentu yang menjadi visi dan tanggung jawab mereka, pemeliharaan selanjutnya dari visi itupun membutuhkan peranan Majelis Jemaat. Sebagai suatu kesatuan, komunitas jemaat secara kolektif perlu terus menerus memelihara visi moral teologis yang melandasi kehidupan, kesaksian dan pelayanan mereka bersama-sama.³⁵ Misalnya, kalau jemaat

memutuskan pelayanan terhadap kelompok manula di kota tersebut merupakan visi utama jemaat, maka tugas Majelis Jemaat adalah membantu agar teologi manula menjadi visi moral yang kuat untuk malandasi pelayanan tersebut. Sebelum ada pelayanan terhadap kelompok pemuda penggangguran harus ada teologi pemuda dan teologi kerja yang kuat. Sebelum melayani krisis-krisis rumah tangga yang menjamur jelas diperlukan teologi pernikahan dan rumah tangga Kristen yang memadai, dst.

Sekali lagi kebutuhan terhadap jaringan-jaringan kerja yang bersifat oikumenis sangat ditekankan. Ketrampilan profesional untuk membentuk, memelihara, dan mengembangkan agar jaringan-jaringan kerja semacam itu terus berfungsi dengan efektif merupakan tuntunan yang makin menguat untuk pelayanan Majelis Jemaat di masa-masa mendatang.

13. KESIMPULAN

Makalah ini mencoba menggali keluar perkembangan pendampingan pastoral di Indonesia dan bagaimana implikasinya bagi peranan Majelis Jemaat dalam pendampingan pastoral. Konsep

pendampingan pastoral yang makin meluas membutuhkan Majelis Jemaat yang juga mampu menghayati perannya yang meluas, meliputi tiga aspek pelayanan baik di dalam maupun di luar dinding-dinding Gereja: aspek individual, komunitas, dan masyarakat luas. Dalam pelayanan pendampingan pastoral yang menyeluruh itu, citra sebagai pemampu merupakan citra yang diharapkan menjadi dasar identitas Majelis Jemaat.

DAFTAR PUSTAKA:

Abineno, J. L. Ch. (1993): *Pedoman Praktis Untuk Pelayanan Pastoral*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

_____. (1968): *Sekitar Theologia Praktika*. Volume 1. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Adams, Jay. (1970): *Andapun Boleh Membimbing*. Malang: Gandum Mas.

Banawiratma, J. B. (1988): "Teologi Fungsional-Teologi Kontekstual" dalam *Konteks Berteologi di Indonesia*. Diedit oleh Eka Darmaputera. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Banawiratma, J. B. and Tom Jacobs. (1989): "Doing Theology with Local Resources". *East Asian Pastoral Review*. 26:1.

Banawiratma, J. B. dan J. Muller. (1993): *Berteologi Sosial Lintas Ilmu*. Yogyakarta: Kanisius.

Berinyuu, Abraham Adu. (1992): "Change, Ritual, and Grieff: Continuity and Discontinuity of

- Pastoral Theology in Ghana". *The Journal of Pastoral Care*. 46:2.
- Bon-Storm, M. (1976): *Apakah Pengembalaan Itu?* Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Browning, Don S. (1976): *The Moral Context of Pastoral Care*. Philadelphia: Westminster Press.
- Clebsch, William R. dan Charles R. Jaekle. (1964): *Pastoral Care in Historical Perspective*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Clinebell, Howard. (1993): "Healing Persons/Healing the Earth -- Pastoral Care Givers Respon to the Eco-justice Crisis". Dalam *Pastoral Care and Counseling in Pluralistic Society*. Diedit oleh Mesach Kristeya. Proceeding of 5th Asia Pasific Conference on Pastoral Care and Counseling, Bali.
- Clinebell, Howard. (1996): *Echo-therapy, Healing Ourselves, Healing the Earth*. Minneapolis: Fortress Press.
- Cooley, Frank L. (1981): *The Growing Seed: The Christian Church in Indonesia*. Jakarta: Dewan Gereja-gereja di Indonesia.
- Darmaputera, Eka. (1999): "Gereja Mencari Jalan Baru Kehadirannya: Melawan Konflik Diri, Menghadapi gerakan Eksternal (Krisis Gerakan Oikumenis di Indonesia dan Dampaknya)". *Penuntun* 4:14.
- Foskett, John dan David Lyall. (1988): *Helping the Helpers: Supervision and Pastoral Care*. London: SPCK.
- Green, Laurie. (1990): *Let's Do Theology*. London: Mowbray.
- Holland, Joe and Peter Henriot. (1980): *Social Analysis: Linking Faith and Justice*. New York, Maryknoll: Orbis York.
- Janssen, P. (1976): *Tehnologi Pastoral*. (Malang: Institute Pastoral Indonesia.
- Janssen, P. (1984): *Pengantar Pekerjaan Pastoral*. Malang: Institute Pastoral Indonesia.
- Judo Poerwowidagdo. (1994): *Towards the 21st Century: Challenges and Oportunities for Theological Education*. Geneva: World Council of Churches.
- Kennedy, William B. (1981): "Learning in, with, and for the Church: the Theological Education of the People of God". *Union Seminary Quarterly Review* 36.
- Kennedy, William B. (1992): "Towards an Educational Paradigm for Practical Theology", *Ministerial Formation* 56.
- Nababan, S. A. E. (ed). (1971): *Pergumulan Rangkap*. Jakarta: Sekretariat Umum Dewan Gereja-gereja di Indonesia.
- Poling, James N. (1991): *The Abuse of Power*. Nashville: Abingdon.
- Poling, James E. and Donald E. Miller. (1985): *Foundation for a Practical Theology of Ministry*. Nashville: Abingdon.
- Simatupang, T. B. (1982): "Doing Theology in Indonesia Today". *Bulletin of the Commission on Theological Concerns*. 3:2.
- _____. (1967): *Tugas Kristen Dalam Revolusi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Sormin, Poltak (1974): *Fungsi Theologia Praktika dan Oraktika Theologia Dalam Pembinaan Umat Yang Dewasa*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Steenberink, Karel A. (1989): "Indonesian Churches 1978-1984: Main trends, issues and problem". *Exchange* 54.

Sumartana, Th. (1982): "A Personal Reflection". *Bulletin of the Commission on Theological Concerns*. 3:2.

Suwondo, Kutut. (1999): "Gereja dalam Konflik dengan Agama-agama Lain". *Penuntun* 4:14.

Thurneysen, Eduard. (1962): *A Theology of Pastoral Care*. Richmond: John Knox Press.

Ton, Phan Bien. (1993): *Rethinking the Nature of Practical Theology in the Indonesian Context*. Tesis M.Th. Sydney College of Divinity.

van Beek, Aart Martin dan Totok S. Wiryasaputra. (1984): *Mendampingi Orang Sakit*. Yogyakarta: R. S. Bethesda.

_____. (1988): "In Pursuit of Wholeness: the Birth of Clinical Pastoral Education in Indonesia". *Asia Journal of Theology* 2

William, Colin W. (1965): *What in the World*. New York: NCCUSA.

Yewangoe, A.A. (1987): *Theologia Crusis di Asia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

¹ Diolah kembali dari bahan yang pernah disampaikan dalam Konvensi I dan Kongres Nasional I Asosiasi Pastoral di Indonesia (API), Bandung, 27-28 Juli 1993.

Disampaikan sebagai bahan diskusi dalam Seminar di ICDS, Bandung, 17 Oktober 2000.

² Pendeta GIA Weleri, pengajar paruh waktu di STT Abdiel dan ICDS Bandung dan Jakarta.

³ Pentahapan ini mengacu dan mengembangkan lebih lanjut pentahapan yang saya lakukan dalam Phan Bien Ton, *Rethinking the Nature of Practical Theology in the Indonesian Context*, Tesis M.Th., (Sydney College of Divinity, 1993): 11-92.

⁴ Struktur hubungan seperti ini dapat dilihat dalam buku Colin W. William, *What in the World*, (New York: NCCUSA, 1965): 42.

⁵ M. Bon-Storm, *Apakah Penggembalaan Itu?* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1976): 23. Definisi ini amat dipengaruhi oleh pandangan Eduard Thurneysen, seorang teolog Jerman. Cf. Eduard Thurneysen, *A Theology of Pastoral Care*, (Richmond: John Knox Press, 1962) sebagai berikut:

- a. Mencari dan mengunjungi anggota jemaat satu persatu.
- b. Mengkabarkan Firman Allah kepada mereka, dalam situasi hidup mereka pribadi.
- c. Melayani mereka sama seperti sekiranya Yesus melayani mereka.
- d. Supaya mereka lebih menyadari akan iman mereka, dan dapat mewujudkan iman itu dalam hidupnya sehari-hari.

⁶ Contoh dalam bidang konseling pastoral yang memakai pendekatan teori ke aplikasi dipopulerkan di kalangan Injili bahkan menolak sumbangan ilmu-ilmu humaniora sama sekali, seperti "*Nouthetic Counseling*" nya Jay Adams. [Lihat Jay Adams, *Andapun Boleh Membimbing*, (Malang: Gandum Mas, 1970)] Ini tidak berarti bahwa pendampingan pastoral dan konseling pastoral dari kelompok ini menjadi kehilangan makna sama sekali (contoh: pelayanan World Vision; Compassion; Doulos Ministries; RSK Baptis, dll).

⁷ J. B. Banawiratma, "Teologi Fungsional-Teologi Kontekstual", dalam Eka Darmaputera (ed), *Konteks Berteologi di Indonesia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1988): 47-64. J. B. Banawiratma and Tom Jacobs, "Doing Theology with Local Resources", *East Asian Pastoral Review*, 26:1 (1989): 51-72. Metode ini sebagai pengembangan dari apa yang dijelaskan dalam tulisan Joe Holland and Peter Henriot, *Social Analysis: Linking Faith and Justice*, (New York, Maryknoll: Orbis York, 1980).

⁸ Lihat P. Janssen, *Tekhnologi Pastoral*, (Malang: Institute Pastoral Indonesia, 1976): Bab 1.

⁹ Janssen menulis "Pastoral dalam arti dewasa ini bukan bimbingan pastor terhadap umatnya sendiri, bukan penggembalaan domba-domba Kristus, melainkan penggembalaan umat manusia dalam perkembangannya oleh Gereja Kristus dengan mewujudkan terus menerus bentuk persekutuan hidup yang dibutuhkan oleh situasi dan kondisi perubahan jaman" (*Pengantar Pekerjaan Pastoral*, (Malang: Institute Pastoral Indonesia, 1984): 11.

¹⁰ Lihat John Foskett dan David Lyall, *Helping the Helpers: Supervision and Pastoral Care*, (London: SPCK, 1988): 45-47. Lihat juga J.L. Ch. Abineno, *Pedoman Praktis Untuk Pelayanan Pastoral*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993): 29-34. Model psikologi terapan ini disebut oleh Abineno dengan istilah: "pelayanan pastoral sebagai konseling pastoral". Definisi pastoral dalam pendekatan ini adalah sebagai berikut: "upaya pertolongan yang dilaksanakan oleh orang-orang Kristen yang representatif, dengan tujuan untuk kesembuhan, penopangan, bimbingan, dan pendamaian orang-orang yang mengalami masalah yang timbul dalam konteks makna dan keprihatinan yang ultima". Definisi ini berasal dari William R. Clebsch dan Charles R. Jaekle, *Pastoral Care in Historical Perspective*, (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1964): 4. Definisi ini sementara memperlihatkan model pendekatan yang berbeda dari definisi Bons-Storm, ternyata memiliki keterbatasan yang serupa dengan definisi Bons-Storm pada masalah ruang lingkup dan pelaksana pendampingan pastoralnya.

¹¹ J. B. Banawiratma dan J. Muller, *Berteologi Sosial Lintas Ilmu*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993). Model ini menekankan bahwa teori teologik dan praksis berhubungan sedemikian rupa secara dialogis, sehingga praksis tidak hanya mengaplikasikan teori, dan sebaliknya praksis tidak membuang teori, melainkan keduanya berfokus bersama dalam pokok pergumulan tertentu. Metode korelasi sudah dikenal sejak Paul Tillich memperkenalkannya. Akan tetapi, metode korelasi Tillich masih sangat bersifat teori-ke-aplikasi: teori teologi dikorelasikan dalam arti diaplikasikan sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang muncul dari situasi. Metode korelasi yang sekarang berkembang lebih mengikuti *revised correlation model* ala David Tracy, di mana

praktek-praktek kultural (yang dipahami melalui ilmu-ilmu humaniora) bukan hanya merupakan sumber pertanyaan yang harus dijawab oleh teologi, melainkan juga berpotensi sebagai pembangkit jawaban alternatif. Praktek-praktek kultural harus dikritik oleh teologi pastoral kita, akan tetapi di pihak lain, teologi pastoral harus bersedia juga dikritik oleh praktek-praktek kultural. Lihat Phan Bien Ton, *Rethinking*, 104-105.

¹² Darmaputera mensinyalir bahwa gereja di Indonesia makin tidak populer, makin dicurigai, disikapi dengan kebencian, dan antipati serta kehadirannya makin dianggap tidak berarti. Peran sosial gereja makin bersifat "hadiah" dan "simbolis" belaka dari para pengambil keputusan di negeri ini, bahkan gereja makin menuju ke arah *irrelevansi total*. Baca Eka Darmaputera, "Gereja Mencari Jalan Baru Kehadirannya: Melawan Konflik Diri, Menghadapi Gerakan Eksternal (Krisis Gerakan Oikumenis di Indonesia dan Dampaknya)", *Penuntun* 4:14 (1999): 191-197.

¹³ Howard Clinebell, "Healing Persons/Healing the Earth – Pastoral Care Givers Respon to the Eco-justice Crisis," dalam Mesach Kristeya (ed.) *Pastoral Care and Counseling in Pluralistic Society*, (Proceeding of 5th Asia Pasific Conference on Pastoral Care and Counseling, Bali, 1993): 41-74. Juga bukunya: *Echotherapy, Healing Ourselves, Healing the Earth*, (Minneapolis: Fortress Press, 1996).

¹⁴ Larry Graham, "Pastoral Theology as public theology in relation to the clinic", unpublished paper, 1999, cited in Ronaldo Sathler-Rosa, "Pastoral Action in a Context of Economic Slavery and Cultural Apathy", Unpublished paper in the 6th International Congress on Pastoral Care and Counseling, Accra, Ghana, 1999, p.7.

¹⁵ Mengomentari tentang aktivisme di kalangan pekerja pastoral, Alistair V.Campbell, teolog dari Inggris, menuliskan bahwa pelayanan pastoral bukan sekedar melaksanakan pekerjaan-pekerjaan baik dengan tehnik-tehnik yang canggih. Pendampingan pastoral menuntut para pendamping menjadi orang yang berkepribadian khusus, bukan sekedar orang yang dilatih sangat profesional (yang penting bukan apa yang dilakukan, tetapi orangnya). Lihat *Rediscovering Pastoral Care*. 2nd edition. (London: Darton, Longman & Todd, 1986), h.15-16.

¹⁶ Ada kritik kuat bahwa gereja di Indonesia, terutama gereja-gereja lokal sering terlalu

sibuk hanya dengan pelayanan pastoral terhadap anggota-anggotanya sendiri dan kurang siap untuk menanggapi situasi sosial yang terjadi di sekitarnya. Pelayanan LSM dirasakan lebih banyak menyentuh kepentingan masyarakat luas. cf. Sutarno, "Kesaksian Kristen dalam Masyarakat Pancasila", Umat Baru, 163, Februari, 1995, h.22-28.

¹⁷ Cf. Don S. Browning, "Mapping the Terrain of Practical Theology, toward a Practical Theology of Care", *Pastoral Psychology*, 36, 1, Fall, 1987, 10-28.

¹⁸ Ilmu-ilmu sosial lebih menunjuk pada sosiologi, dan barangkali, ilmu politik. Sedangkan "ilmu-ilmu humaniora" lebih bersifat inklusif dan mencakup suatu wilayah studi yang luas meliputi disiplin psikologi, sosiologi, antropologi, hukum, ilmu politik, dan sejarah.

¹⁹ Tokoh terkemuka yang dianggap memelopori pendekatan ini dalam bidang pastoral adalah Seward Hiltner yang berpandangan bahwa materi untuk pemahaman teologis tidak disediakan oleh kebenaran teoretik atau pernyataan-pernyataan dogmatik, melainkan harus dicari melalui studi kasus pelayanan pastoral secara empirik dengan bantuan ilmu-ilmu kemanusiaan. Cf. Preface to *Pastoral Theology* (Nashville: Abingdon, 1958); h.22-23. Catatan: bab 1-4 buku ini telah diterjemahkan dan menjadi bagian dari Tjaard G. Hommes dan E. Gerrit Singgih, *Teologi dan Praksis Pastoral: Antologi Teologi Pastoral*. (Yogyakarta: Kanisius dan Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992), 72-159.

²⁰ Pendampingan pastoral yang bersifat kuratif meliputi 4 macam fungsi: healing (penyembuhan), sustaining (pendukungan), guiding (bimbingan), dan reconciling (pendamaian), seperti yang diuraikan oleh William R. Clebsch dan Charles R. Jaekle, *Pastoral Care in Historical Perspective* (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1964). Lihat juga J.L.Ch. Abineno, *Pedoman Praktis*, h.48-67.

²¹ Cf. Howard C. Clinebell, *Basic Types of Pastoral Care and Counseling* (Nashville: Abingdon Press, 1984), 43.

²² Paul Tillich menyatakan: "Human caring is universal". Ini berarti bahwa sifat dasar kemanusiaan manusia adalah "caring, merawat, mendampingi". Citra dasar manusia yang mulia ini adalah mengacu kepada citra Allah sebagai pencipta yang bersifat mendampingi, merawat. Sejak awal Allah peduli, mem-perhatikan keadaan yang

khaostik dan berkarya untuk menyela-matkan dan membebaskan (Kejadian 1:1-2). Dikutip oleh Totok S. Wiryasaputra, "Pengertian Dasar tentang Konseling Pastoral", *Buletin Holistik*, No.2, 1988, 42-47.

²³ Cf. Robert Kysar, *Called To Care: Biblical Images for Social Ministry*. (Minneapolis: Augsburg Fortress, 1991), p.vii

²⁴ Seperti dikutip oleh Howard A. Snyder, *Models*, 147.

²⁵ Cf. Paul H. Ballard, "The Form of Practical Theology", in *Ministry, Society and Theology*, Vol.5, No. 2, November, 1991, 60.

²⁶ Eka Darmaputera menyatakan bahwa salah satu masalah utama kontekstualisasi adalah masalah hermeneutik. Cf. "Menuju Teologi Kontektual di Indonesia", dalam Eka darmaputera (ed.), *Konteks Berteologi di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1988), 11.

²⁷ Harus diakui bahwa di Indonesia belum muncul bentuk teologi kontekstual yang cukup kuat dibandingkan dengan, misalnya, teologi Minjung di Korea Selatan, teologi Dalit di India, dsb.

²⁸ Istilah ini belum populer di kalangan gereja, tetapi sudah mulai dikenal dan diterima di kalangan pendidikan teologi. Hasil pertemuan "Konsultasi Kurikulum Pendidikan Theologia PERSETIA" di Kaliurang 7-13 Maret 1994, misalnya, mengusulkan citra "pemampu" sebagai harapan terhadap hasil pendidikan teologi di Indonesia pada masa mendatang. Bandingkan juga tulisan Judo Poerwowidagdo, *Towards the 21st Century: Challenges and Oportunities for Theological Education*, (Geneva: World Council of Churches, 1994): 61.

²⁹ Tradisi tiap-tiap Gereja dan denominasi dalam masalah visitasi ini berbeda-beda, tetapi adalah suatu kewajaran untuk mengharapkan pendeta mengunjungi setiap anggota jemaatnya minimal satu kali setahun dalam suatu kunjungan yang disebut **visitasi besar**, sementara anggota-anggota majelis lain melakukan visitasi kedua, ketiga, dan seterusnya, sesuai dengan pengaturan model visitasi yang dipilih (bisa teritorial, bisa kategorial).

³⁰ Dalam beberapa tradisi Gereja, visitasi oleh Majelis Jemaat atau para penatua merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan dengan alasan kesibukan yang terlalu menyita waktu. Untuk tidak melakukan kewajiban visitasi karena alasan beban pekerjaan yang terlalu berat atau beban masalah pribadi, seorang anggota majelis

wajib meminta ijin resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk cuti dari kewajiban visitasi ini sementara waktu atau secara permanen.

³¹ Lihat Aart Martin van Beek dan Totok S. Wiryasaputra, *Mendampingi Orang Sakit*, (Yogyakarta: R.S. Bethesda, 1984): 30. Bandingkan Abraham Adu Berinyuu, "Change, Ritual, and Grief: Continuity and Discontinuity of Pastoral Theology in Ghana", *The Journal of Pastoral Care*, 46:2 (1992): 141-152.

³² Dalam hal ini ada berbagai cara dalam berbagai tradisi gereja. Ada gereja yang hanya bergantung pada 'kesensitifan' pengkotbah terhadap Roh Kudus dan situasi jemaat, ada gereja yang mensuplai pengkotbah dengan berbagai informasi yang dibutuhkan tentang keberadaan jemaat, ada yang hanya menetapkan topik atau tema yang dibutuhkan jemaat, namun ada juga gereja yang membentuk komisi kotbah yang bersama-sama pengkotbah menggumuli kotbah yang tepat (proses berteologi dan proses pembentukan homili secara kolektif). Pilihan terakhir kelihatannya merupakan alternatif yang lain belum lazim di Indonesia. Barangkali perlu digumuli untuk diselenggarakan secara teratur meskipun tidak perlu setiap minggu.

³³ Cf. William B. Kennedy, "Learning in, with, and for the Church: the Theological Education of the People of God", *Union Seminary Quarterly Review* 36 (1981): 27-38; "Towards an Educational Paradigm for Practical Theology", *Ministerial Formation* 56 (January 1992): 24-36.

³⁴ Fasilitas terhadap informasi kultural maupun teologis tersebut dapat saja memanfaatkan para ahli dalam berbagai bidang ilmu, tanpa mengasumsikan bahwa teologi adalah hak eksklusif kaum elite dan teolog. Ini merupakan implikasi dari pendekatan dialogis yang holistik/integratif dari pendampingan pastoral yang diusulkan di depan. Pelaksanaan praktis dari pendekatan ini adalah memanfaatkan setiap pakar yang ada terutama di tengah-tengah jemaat untuk membantu menganalisis dan mendekati masalah dari kaca mata disiplin ilmu yang mereka tekuni.

³⁵ Lihat Don S. Browning, *The Moral Context of Pastoral Care*, (Philadelphia: Westminster Press, 1976): 96.